ANUVA Volume 9 (2): 217-232, 2025
Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online
Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

Perkembangan Taman Siswa Sebagai Sekolah Berbasis Kearifann Lokal di Kota Yogyakarta, 1920-1942

Salsabila Nur Hidayah[*)], Tri Handayani

Program Studi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia

[*)] Korespondensi: salsabilanurhidayah23@gmail.com

Abstract

[Title: The Development of Taman Siswa as a School Based on Local Wisdom in Yogyakarta, 1920–1942] This article discusses the development of Taman Siswa as a school based on local wisdom in Yogyakarta during the period of 1920–1942. The study focuses on reconstructing the dynamics of its establishment, educational implementation, and resistance against pressures from the Dutch colonial government. Using the historical method, this research explores the educational philosophy of Ki Hadjar Dewantara, strategies rooted in local culture, and the challenges faced, such as the enforcement of the Wild School Ordinance and the prohibition against indigenous teachers. Yogyakarta's strategic geographic position as a regional center of governance also contributed to the emergence of national education initiatives grounded in local values. In practice, Taman Siswa emphasized character education and cultural respect through the philosophy "Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani." The curriculum integrated elements of art, traditional games, and national values to shape a generation that was independent and nationally minded. The findings reveal that Taman Siswa succeeded in developing an alternative model of education that not only rejected the discriminatory colonial system but also fostered national consciousness through cultural approaches. More than an educational institution, Taman Siswa emerged as a cultural movement and symbol of anti-colonial resistance. Its contribution in expanding educational access and strengthening national identity positioned it as a crucial milestone in the history of Indonesian education that strives for independence, dignity, and people-oriented values.

Keywords: taman siswa; local wisdom; colonial education; ki hadjar dewantara

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perkembangan Taman Siswa sebagai sekolah berbasis kearifan lokal di kota Yogyakarta pada kurun tahun 1920-1942. Penelitian ini difokuskan pada rekonstruksi dinamika pendirian, pelaksanaan pendidikan, serta perjuangan Taman Siswa dalam menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Melalui metode sejarah, kajian ini menelusuri pemikiran Ki Hadjar Dewantara, strategi pendidikan berbasis budaya lokal, serta respons terhadap kebijakan kolonial seperti Ordonansi Sekolah Liar dan larangan bagi guru pribumi untuk mengajar. Kondisi geografis Yogyakarta yang strategis turut mendorong berkembangnya pendidikan nasional yang menjunjung nilai-nilai lokal. Dalam praktiknya, Taman Siswa menekankan pendidikan karakter dan penghormatan terhadap budaya nasional melalui filosofi *"Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani."* Kurikulumnya mengintegrasikan seni, permainan tradisional, dan nilai kebangsaan untuk membentuk generasi muda yang mandiri dan berkarakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Siswa berhasil mengembangkan model pendidikan alternatif yang menolak sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif serta membangun kesadaran nasional melalui pendekatan budaya. Taman Siswa tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga simbol gerakan kebudayaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Kontribusinya dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat identitas nasional menjadikannya sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia yang merdeka dan berpihak kepada rakyat.

Kata kunci: taman siswa; kearifan lokal; pendidikan kolonial; ki hadjar dewantara

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena melalui pendidikan, generasi penerus dapat membangun masa depan yang lebih baik (Abdurrachman, 1986: 30). Kualitas pendidikan berperan sentral dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi langkah yang sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bangsa.

Tujuan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang memajukan bangsa. Pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan utama membentuk warga negara yang tunduk dan mengabdi kepada kepentingan penjajah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja yang berfungsi sebagai alat penguat kedudukan kolonial Belanda. Tujuan pendidikan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan kolonial. Materi pendidikan hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kekuasaan penjajah. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berfokus semata-mata menghasilkan sumber daya manusia yang setia kepada kepentingan pemerintah kolonial Belanda (Djohan, 1993: 73).

Perjuangan dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan dari peran Ki Hadjar Dewantara sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkannya. Melihat penderitaan rakyat pribumi di bawah penjajahan kolonial Belanda, Ki Hadjar Dewantara menyadari bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan kolonial semata (Makmur, 1993: 15). Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mengubah kondisi sosial maupun ekonomi penduduk pribumi, mereka tetap hidup menderita.

Salah satu karakteristik utama dari pendidikan kolonial adalah pengenalan komunikasi dalam proses belajar mengajar menggunakan bahasa Belanda. Kurikulum yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat. Pendidikan ini lebih diutamakan untuk membentuk tenaga kerja terampil guna mendukung kepentingan kolonial Belanda daripada untuk mengembangkan budaya dan identitas bangsa Indonesia (Alisa, 1970: 17-82). Salah satu reaksi paling signifikan dari Ki Hadjar Dewantara adalah kritiknya terhadap penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Menurutnya, penggunaan bahasa asing dalam proses belajar mengajar tidak hanya memperlebar jarak antara siswa dengan budaya dan identitas lokal, tetapi juga menjadikan pendidikan sebagai alat dominasi dan kontrol penjajahan. Kurikulum pendidikan kolonial yang sarat dengan nilai-nilai Barat dianggap tidak relevan dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai reaksi nyata terhadap ketidakpuasannya terhadap sistem pendidikan kolonial, Ki Hadjar Dewantara bersama teman-temannya mendirikan Paguyuban Selasa Kliwonan. Paguyuban ini berfungsi sebagai forum diskusi untuk merumuskan gagasan mengenai pembentukan sekolah yang berlandaskan pada identitas dan kearifan bangsa Indonesia. Hasil dari diskusi ini, muncul gagasan untuk mendirikan sekolah

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

yang tidak hanya menekankan pada pendidikan akademis, tetapi juga menyediakan pendidikan berbasis kearifan lokal dan memperjuangkan kebebasan berpikir bagi siswa.

Ki Hadjar Dewantara kemudian merealisasikan gagasan tersebut dengan mendirikan sekolah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, yang awalnya diberi nama "*National Onderwijs Instituut Taman Siswa*" (Muljana, 2008: 108). Sekolah ini berfokus pada pendidikan berbasis kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Melalui Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kebebasan berpikir kepada para siswa, agar mereka menjadi individu yang merdeka secara mental dan fisik. Ki Hadjar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang berlandaskan kearifan lokal, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari tradisi dan budaya Indonesia sekaligus mengembangkan kreativitas mereka. Ia menyadari pentingnya mempertahankan serta menghargai budaya dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran, yang kemudian tercermin dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa (Tsuchiya, 1992: 65).

Keberadaan Taman Siswa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak pribumi, sehingga mereka tidak hanya mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Taman Siswa menganut prinsip bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk menjadi bebas dan mandiri secara mental maupun fisik. Prinsip dasar pendidikan di Taman Siswa adalah untuk mengajarkan kebebasan dalam menentukan usaha dan kehendak sendiri. Dengan demikian, setiap individu berhak mencapai kebebasan yang sejati tanpa adanya pengekangan (Soeratman, 1986: 72-73).

Ki Hadjar Dewantara sebagai pendidik sangat menghargai dan mempromosikan kearifan lokal dalam sistem pendidikan yang ia terapkan. Ia mendorong siswa dan guru untuk memahami serta menghargai budaya lokal sebagai sumber pengetahuan yang berharga dan perlu dilestarikan. Pemahaman tersebut mencakup tradisi, bahasa, seni, dan nilai-nilai lokal. Ki Hadjar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ia mendorong pengembangan kurikulum yang menggabungkan pengetahuan global dan kearifan lokal. Pendidikan menurutnya harus mengajarkan keterampilan yang bermanfaat dalam konteks budaya dan lingkungan siswa. Dengan pendidikan yang memuat nilai-nilai budaya lokal, Ki Hadjar Dewantara berharap masyarakat dapat mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya.

Masyarakat Indonesia pada abad ke-20 menunjukkan minat yang tinggi terhadap pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, *Departemnt Van Onderwijs* yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mampu memenuhi pendidikan kibat keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pendidikan Barat yang dinilai tidak memuaskan kebutuhan rakyat. Ki Hadjar Dewantara mengkritik sistem pendidikan Barat tersebut karena dianggap terlalu intelektualistik dan materialistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial, Ki Hadjar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa yang

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

mengintegrasikan pengajaran nilai-nilai budaya dan sejarah untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah perkembangan Taman Siswa sebagai sekolah berbasis kearifan lokal di Kota Yogyakarta pada periode 1920-1942.

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk membahas mengenai perkembangan Taman Siswa sebagai sekolah berbasis kearifan lokal secara historis. Berdasar pada uraian tentang maksud penulisan artikel, maka tujuan penulisan artikel ini adalah:

Pertama, menganalisis kondisi geografis, sosial, dan pendidikan di Kota Yogyakarta; *Kedua*, mengungkapkan pendirian sekolah Taman Siswa dengan sistem pendidikan berbasis kearifan lokal; *Ketiga*, mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendidikan berbasis kearifan lokal di Taman Siswa.

2. Landasan Teori

2.1. Pendidikan

Konsep pendidikan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses yang dirancang secara terencana untuk membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, serta memiliki kesadaran kebangsaan. Proses pendidikan tersebut dilandasi oleh pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses alih pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa. Dalam konteks Taman Siswa, pendidikan dijalankan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial yang menindas, dengan menekankan pentingnya kemerdekaan berpikir, penguatan budi pekerti, serta penghormatan terhadap tradisi dan budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu, pendidikan diposisikan sebagai alat untuk membangun kesadaran nasional dan memperkuat identitas budaya melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pribumi.

2.2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan, nilai, serta pandangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakat setempat dan telah terbukti mengandung kebijaksanaan serta nilai-nilai positif. Secara etimologis, istilah "kearifan lokal" terdiri atas dua kata, yaitu "kearifan" yang berarti kebijaksanaan, dan "lokal" yang merujuk pada sesuatu yang bersifat setempat. Dengan demikian, kearifan lokal mencerminkan keunggulan budaya suatu daerah yang tercermin dalam pola pikir, etika, nilai-nilai, serta perilaku yang berkembang secara turun-temurun dan telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerahnya secara bijak, berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam tradisi (Yunus, 2015: 1).

3. Metode

Artikel penelitian disusun dengan mengaplikasikan metode sejarah, yaitu cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu untuk disajikan dalam bentuk tulisan sejarah (Heryati, 2021: 8). Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (penelusuran dan pengumpulan sumber), kritik (menguji sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan).

Pada tahap heuristik, sumber-sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan yaitu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Museum Dewantara

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

Kirti Griya. Sumber sekunder yang digunakan yaitu, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Museum Dewantara Griya Kirti, Perpustakaan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kondisi Kota Yogyakarta Tahun 1920-1942

Kota Yogyakarta pada periode 1920–1942 mengalami perkembangan signifikan baik secara geografis, administratif, maupun demografis. Secara geografis, kota ini dibentuk oleh tiga sungai utama Winongo, Code, dan Gajah Wong, yang memengaruhi pola jalan dan permukiman. Pada tahun 1920, wilayah kota seluas 20,68 km² dihuni oleh 134.231 jiwa. Kondisi tanah yang berpasir membuat kota ini jarang mengalami banjir, meskipun memiliki curah hujan yang tinggi. Masyarakat memperoleh air bersih melalui jaringan dinas air minum dan sumur-sumur buatan dengan kedalaman rata-rata 10 hingga 15 meter (Tim penelitian, 1971: 1).

Secara administratif, pemerintah membagi wilayah Yogyakarta menjadi tiga afdeeling, yaitu Mataram, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Pemekaran wilayah kota berlangsung ke arah utara seiring dengan pembangunan keraton, benteng kompeni, dan permukiman bangsawan. Kompleks Keraton Yogyakarta atau Jeron Beteng menjadi pusat pemerintahan dan budaya kota. Di sekelilingnya, berkembang kampung-kampung fungsional yang dihuni oleh abdi dalem sesuai tugas masing-masing. Di luar tembok benteng, tumbuh permukiman yang berbasis profesi, seperti kampung tukang kayu, kampung jaksa, serta kampung prajurit (Goenawan, dkk., 1984/1985: 17).

Dalam bidang pendidikan, perkembangan awal pendidikan berlangsung di lingkungan keraton dan kadipaten seperti Pakualaman. Para bangsawan dan kerabat kerajaan memperoleh pendidikan tentang tata negara, sastra Jawa, dan agama. Beberapa sekolah swasta, seperti Sekolah Jero Gede dan Sekolah Padmosekarnan, berdiri di wilayah Pakualaman. Sementara itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah formal seperti EIS (*Eerste Inlandsche School*) dan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), yang hanya dapat diakses oleh anak-anak dari kalangan elit pribumi. Sistem pendidikan kolonial tersebut bersifat diskriminatif dan memperkuat stratifikasi sosial karena hanya kelompok tertentu yang mendapatkan akses pendidikan tinggi, terutama yang menguasai bahasa Belanda (Kutoyo, dkk., 1997: 251).

Sistem kolonial tidak hanya memengaruhi pendidikan, tetapi juga membentuk struktur sosial masyarakat Yogyakarta. Kaum priyayi dijadikan sebagai perantara kekuasaan kolonial, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan oleh sistem pajak dan aturan yang eksploitatif. Pendidikan kolonial berperan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja patuh yang tunduk pada sistem penjajahan, bukan sebagai sarana untuk membebaskan pikiran dan potensi rakyat. Sebagian elit pribumi meniru gaya hidup Belanda, sehingga terjadi pergeseran nilai budaya di kalangan bangsawan Jawa.

Namun demikian, munculnya kaum terpelajar pribumi juga menandai fase penting dalam sejarah kebangkitan nasional. Akses terbatas ke pendidikan Barat memungkinkan segelintir orang pribumi mengenal nilai-nilai modern, seperti demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan. Kesadaran ini kemudian melahirkan gerakan kebangsaan dan tuntutan atas sistem pendidikan yang lebih adil.

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang elitis dan menindas, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sekolah ini menawarkan pendidikan alternatif yang berbasis kearifan lokal, inklusif, dan partisipatif. Taman Siswa menekankan pentingnya pembentukan identitas nasional, semangat kebangsaan, serta penghargaan terhadap budaya lokal. Prinsip pendidikan "*Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*" dijadikan sebagai dasar pendekatan pembelajaran yang memanusiakan peserta didik. Pendidikan di Taman Siswa tidak bertujuan mencetak pegawai, tetapi berfungsi sebagai alat pembebasan bangsa dari penjajahan.

4.2. Pendirian dan Perkembangan Sekolah Taman Siswa Dengan Sistem Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 1920-1942

Pendirian Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Lembaga ini lahir sebagai respons atas ketimpangan dan ketidakadilan sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif, elitis, dan berorientasi pada kepentingan pemerintah Belanda. Sistem pendidikan kolonial tidak hanya membatasi akses masyarakat pribumi terhadap pendidikan, tetapi juga membentuk mentalitas tunduk dan ketergantungan, menjadikan pendidikan sebagai alat kontrol sosial dan politik.

Ki Hadjar Dewantara, tokoh utama di balik pendirian Taman Siswa, telah melalui pengalaman politik dan pengasingan yang membentuk pandangan kritisnya terhadap kolonialisme. Selama masa pengasingannya di Belanda, Ki Hadjar memanfaatkan waktu untuk mendalami pemikiran tokoh-tokoh pendidikan progresif dunia seperti Friedrich Frobel, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Pandangan mereka yang menekankan pendidikan anak berdasarkan kebebasan, cinta, dan potensi individu sangat memengaruhi konsep pendidikan yang kemudian dibawa oleh Ki Hadjar ke Indonesia. Ia merumuskan sistem pendidikan yang membebaskan, membentuk karakter, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal bangsa Indonesia.

Setelah kembali dari masa pengasingannya di Belanda, Ki Hadjar Dewantara membawa semangat baru untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selama masa pengasingan tersebut, ia mengasah keterampilan mengajar sekaligus mematangkan visi pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal. Ki Hadjar Dewantara semakin menyadari bahwa sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif hanya menguntungkan penjajah dan tidak relevan dengan kebutuhan serta konteks masyarakat pribumi. Pengalaman ini memperkuat tekadnya untuk merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta konteks masyarakat pribumi. Pengalaman ini memperkuat tekadnya untuk merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan budaya lokal Indonesia (Soeratman, 1986: 80).

Keterlibatan Ki Hadjar Dewantara dalam perkumpulan Selasa Kliwonan, sebuah forum yang mengkaji isu-isu kebudayaan dan pendidikan secara rasional, juga sangat memengaruhi visinya (Dewantara, 1959: 8). Dalam perkumpulan ini,anggota-anggota berbagi tugas untuk memajukan pendidikan, di mana R. Suwardi Suryaningrat (nama asli Ki Hadjar Dewantara) memfokuskan diri pada pendidikan anak, sementara Ki Ageng Suryomataram menangani pendidikan orang dewasa (Majelis Luhur

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

Persatuan Taman Siswa, 1977: 10-11). Perkumpulan tersebut memandang pendidikan sebagai kunci untuk menghapus penjajahan dan memajukan bangsa, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan yang bermartabat. Pendirian Taman Siswa pada tahun 1922 (Moh. Said, 1972: 132) merupakan wujud konkret dari visi Ki Hadjar Dewantara yang lahir dari pengalaman dan keterlibatannya dalam berbagai diskusi tersebut.

Setelah mendirikan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara kemudian merumuskan struktur organisasi berdasarkan hierarki yang terorganisir. Struktur ini dirancang untuk mendukung pengelolaan pendidikan dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Grafik 1.1 Stuktur Organisasi Persatuan Taman Siswa

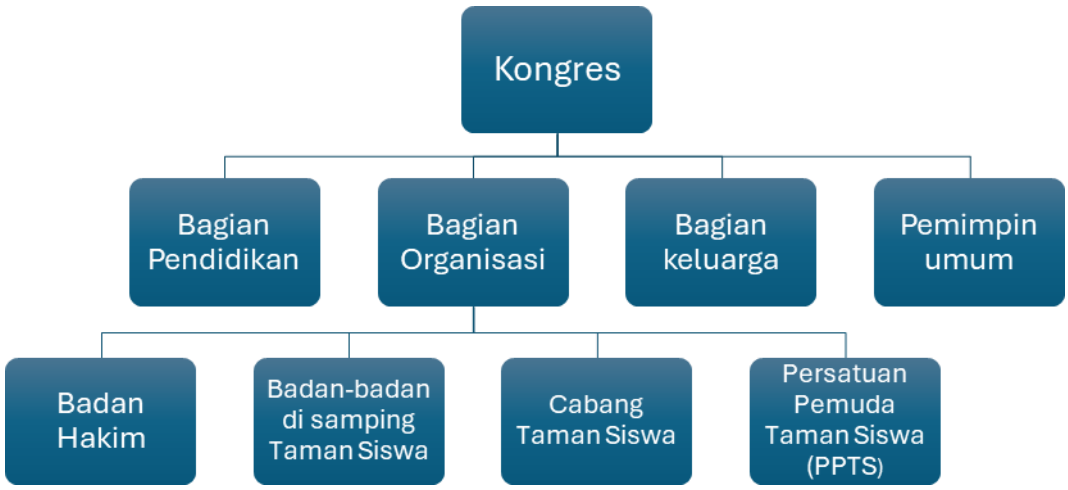

Sumber: Buku Ketamansiswaan: untuk Taman Madya, Taman Karya, Taman Guru Muda Taman Siswa, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1987.

Struktur organisasi Taman Siswa mencakup berbagai fungsi penting yang dijalankan oleh anggota-anggota berikut:

a. Bagian pendidikan: Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, kursur-kursus, perlengkapan alat-alat pengajaran, serta gerakan pemuda dan penerbitan.
b. Bagian organisasi: Mengurus Arsip dokumentasi, tata tertib organisasi dan kekeluargaan.
c. Badan pengurus dan badan keluarga: Menghubungkan Taman Siswa dengan masyarakat, berusaha untuk kemajuan Taman Siswa dalam hal yang mengenai kebendaan bagi Taman Siswa.
d. Pemimpin umum: yang bertanggung jawab tentang organisasi, kepada kepala Rapat Besar Umum, ialah Ki Hadjar Dewantara, sebagai pendiri Taman Siswa. Pemimpin umum oleh Madjelis Luhur dapat diberi hak leluasa dalam hal yang luar biasa yang madjelis luhur tidak dapat menyelesaikannya.
e. Pengetua Taman Siswa: orang yang turut mendirikan Taman Siswa pertama kali dengan Ki Hadjar Dewantara, yang berkewajiban turut menjaga kemurnian asas-asas Taman Siswa.
f. Badan Hakim: badan apel di Taman Siswa untuk perkara-perkara yang telah mendapat keputusan dari Majelis luhur. Badan-badan di samping Taman Siswa, yakni: Wanita Taman Siswa, Pemuda Pelajar Taman Siswa, Ikatan Keluarga Taman Siswa, Badan Ekonomi, Badan Fonds Keluarga Taman Siswa, Badan Penyongkong.

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

g. Susunan Majelis Luhur:

a) Badan pusat: Ki Hadjar Dewantara, Ki Pronowidigdo, dan Ki Tjokrodirdjo.

b) Anggota-anggota lainnya: Sadikin, Sudyono, Puger, Kadirun, Safiudin, dan Sarmidi.

c) Penasihat: - Bagian Pengajar: Ki Hardjosusastro, Bagian Administrasi: Rudjito di Yogyakarta, Bagian Hukum: Mr. Sujudi di Yogyakarta.

d) Pemimpin-pemimpin umum: S. Mangunsarkoto (Jawa Barat), Sukemi (Jawa Tengah), dan Djojoprajitno (Jawa Timur) (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1952: 221-222).

Dengan struktur yang sistematis, Taman Siswa mampu menjalankan fungsi pendidikan yang komprehensif, mencakup aspek akademis, karakter, dan budaya. Hal ini sejalan dengan visi Ki Hadjar Dewantara untuk menciptakan sistem pendidikan yang mendukung kemandirian dan kemajuan bangsa. Setelah struktur organisasi terbentuk, Taman Siswa kemudian merancang kurikulum berbasis kearifan lokal. Sistem pendidikan kolonial Belanda pada masa itu lebih menekankan kebutuhan administrasi dan tenaga kerja terampil untuk kepentingan penjajah. Sistem ini mengabaikan keberagaman budaya dan kearifan lokal (Iskandar, 1989: 72). Kurikulum yang diajarkan cenderung berfokus pada nilai-nilai Barat, yang sering kali membuat siswa kehilangan identitas dan budaya mereka. Sebagai respons terhadap hal ini, Taman Siswa menawarkan materi pembelajaran yang berbeda.

Pendekatan ini menjadi bentuk perlawanan Ki Hadjar Dewantara terhadap sistem pendidikan kolonial yang hanya menekankan aspek intelektual. Rencana pembelajaran di Taman Siswa disusun dengan konsep pendidikan komprehensif yang mencakup intelektual dan karakter. Para pamong memberikan koreksi secara tepat sesuai situasi psikologis siswa, tanpa teori terstruktur atau jadwal yang kaku. Pembelajaran budi pekerti diberikan melalui pembiasaan sejak dini, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan yang lebih besar (Erik Muhammad, 2024).

Dalam hal pendanaan, Taman Siswa memulai dengan sumbangan dari Sekolah Adi Darma, yang meliputi bangku sekolah dan fasilitas untuk acara peresmian. Meskipun Taman Siswa memulai dengan sumber daya terbatas, langkah ini menjadi dasar penting bagi perkembangan lembaga di masa depan. Taman Siswa memerlukan dana untuk operasional dan melengkapi fasilitas, tetapi memilih untuk tidak menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda guna menjaga independensinya. Pendanaan diperoleh dari biaya pendaftaran siswa baru, iuran bulanan yang terjangkau, serta sumbangan yang tidak membatasi kebebasan lembaga. Sistem paguron yang diterapkan juga membantu meringankan biaya dengan menekankan gotong royong, sehingga biaya operasional dapat ditekan.

Tabel. Pendanaan Iuran Masuk Taman Siswa

No.	Pendanaan Iuran Masuk Taman Siswa	Jumlah
1.	Pendapatan	
	a. Kelas dengan 30 anak, masing-masing membayar f 3.50	f 105,-
	b. Kelas dengan 30 anak, masing-masing membayar f 3.50	f 105,-
	c. Kelas dengan 30 anak, masing-masing membayar f 3.50	f 105,-
TOTAL PENDAPATAN :		f 315,-
2.	Pengeluaran	

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

	a. Guru pembantu dari sekolah rendah Gaji f 40.- ditambah sewa tempat tinggal f 20.-	f 60,-
	b. Gaji pembantu dari MULO Gaji f 60.- ditambah sewa tempat tinggal f 20.-	f 80,-
	c. Guru dengan diploma yang baru mulai Gaji f 70,- ditambah sewa f 20.-	f 90,-
TOTAL PENGELUARAN		f 230,-
SISA DANA		f 85,-

Sumber: Buku Keuangan Taman Siswa (Museum Dewantara Griya Kirti), 1930.

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun dana yang diperoleh dari iuran masuk terbatas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien untuk menutupi berbagai pengeluaran, termasuk gaji guru dan kebutuhan operasional lainnya. Sistem paguron yang menekankan gotong royong membantu Taman Siswa untuk mempertahankan kegiatan pendidikan dengan biaya yang terjangkau, sambil tetap menjaga kualitas pengajaran. Partisipasi orang tua siswa yang mampu secara finansial juga dioptimalkan dalam pembiayaan ini memberikan dampak positif pada stabilitas keuangan Taman Siswa, sehingga tidak memberatkan perguruan. Keterlibatan orang tua dalam pembiayaan ini memberikan dampak positif pada stabilitas keuangan Taman Siswa, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pendidikan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Taman Siswa cukup tinggi dan didasari oleh cita-cita Bersama untuk merdeka dari pengaruh pendidikan kolonial (Dewantara, 1935: 87-88).

Prasarana pendidikan memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Di Taman Siswa, meskipun menggunakan fasilitas sederhana seperti kursi dan meja dari sumbangan Sekolah Adi Darma, semangat untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas tetap tinggi. Selain itu, Taman Siswa menyediakan rumah pengajaran yang juga berfungsi sebagai rumah pendidikan, dikenal sebagai "pawiyatan" atau "asrama," serupa dengan konsep pondok pesantren. Upaya ini mendukung visi Ki Hadjar Dewantara dalam menyediakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berfokus pada pengembangan moral dan kemandirian siswa.

"Paguron" menjadi pusat pendidikan yang aktif sepanjang waktu, di mana siswa dapat belajar di luar jam pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta budaya. Selain itu, pondok asrama disediakan untuk siswa dari luar daerah, dengan suasana kekeluargaan yang dijaga oleh pamong. Taman Siswa juga menyediakan wisma untuk siswa laki-laki dan perempuan, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan kemandirian. Infrastruktur yang memadai memungkinkan terlaksananya kegiatan belajar, ekstrakurikuler, dan acara budaya, yang memperkaya pengalaman siswa dan mempererat hubungan komunitas.

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

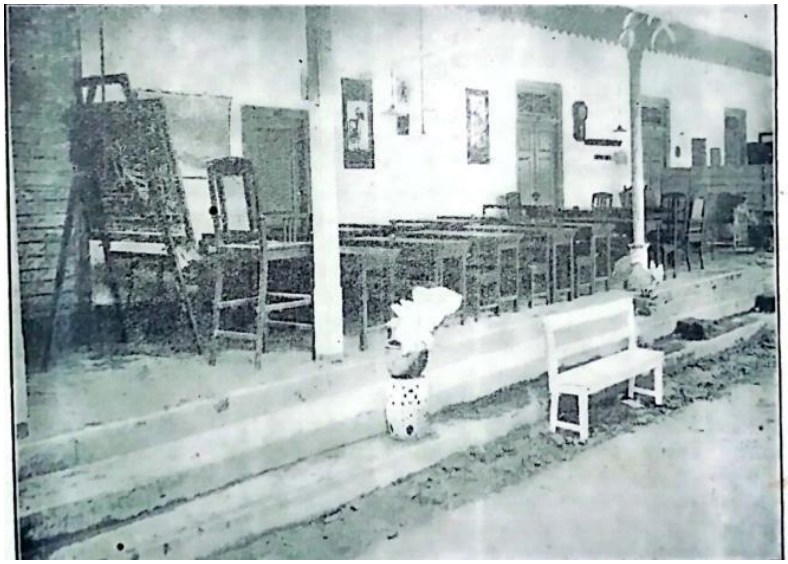

Gambar. Kelas Pengajar di dalam Rumag Guru: Emper, Ampok, Pendopo, Pelataran
(Majalah Poesara, 1935)

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai respons terhadap ketidakadilan dalam sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif. Pendidikan kolonial berfokus pada mencetak tenaga kerja murah yang mendukung kepentingan pemerintah Belanda, tanpa memprioritaskan kecerdasan atau kesejahteraan rakyat pribumi (Gunawan, 2000: 25). Pendidikan kolonial mengategorikan pendidikan berdasarkan status sosial dan keturunan, sehingga akses Pendidikan menengah dan tinggi hanya dapat dinikmati oleh segelintir pribumi. Taman Siswa hadir sebagai alternatif dengan tujuan memberdayakan rakyat melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Ki Hadjar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah kunci pembebasan dari penderitaan dan penindasan kolonial.

Setelah berdirinya sekolah pertama Taman Siswa di Yogyakarta, masyarakat menyambut baik gerakan ini. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah cabang Taman Siswa. Beberapa cabang baru hanya menyandang nama tanpa mencerminkan substansi Taman Siswa karena tidak sepenuhnya memahami prinsip dasar organisasi. Majelis Luhur Taman Siswa menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta pada 6-13 Agustus 1930 (Ki Hadjar Dewantara, 1930). Kongres ini bertujuan untuk membahas arah kebijakan organisasi dan memastikan bahwa prinsip prinsip pendidikan nasional diterapkan secara konsisten di seluruh cabang. Taman Siswa tetap berinovasi dengan membuka bagian *MULO* (sekolah menengah) dan *Kweekschool* (sekolah guru) pada tahun 1924 untuk memenuhi permintaan pendidikan yang lebih tinggi, meskipun menghadapi tantangan dari pemerintah kolonial. Berbagai pihak semula bersikap skeptis terhadap inisiatif ini. Namun, kedua bagian ini berkembang pesat dan mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam waktu tiga tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

pendekatan pendidikan yang diterapkan Taman Siswa relevan dan mampu menjawab tantangan pada masanya.

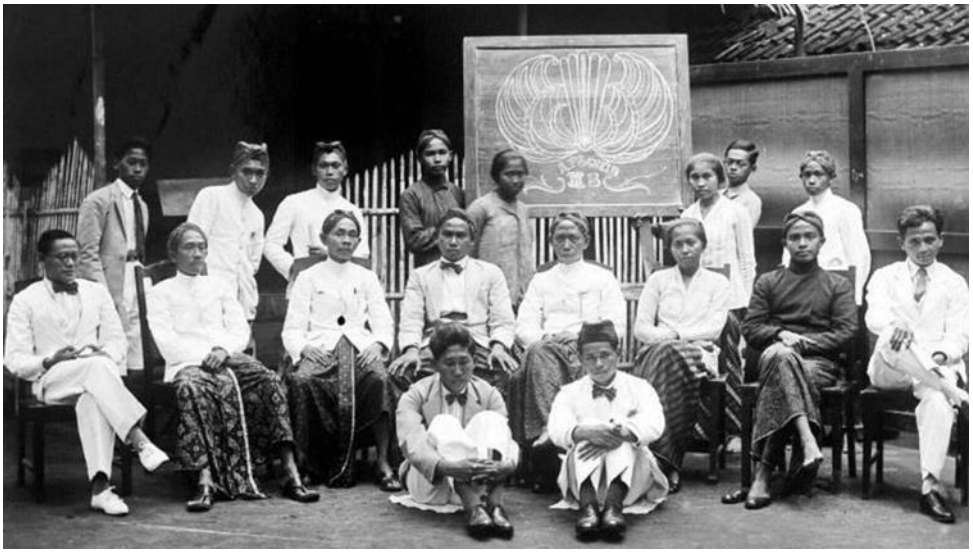

Gambar. Kongres Pertama Taman Siswa di Yogyakarta 1930 (De Nationalistische Beweging in Ned. Indie, 1931).

Pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar pada awal abad ke-20. Undang-undang ini bertujuan mengendalikan gerakan pendidikan swasta yang tidak memiliki izin resmi, termasuk Taman Siswa. Majelis Luhur Taman Siswa dan Ki Hadjar Dewantara menentang keras ordonansi ini. Mereka menginstruksikan cabang cabang untuk mempercepat penyebaran pandangan mereka (Dyah, 2020: 112). Pemimpin Taman Siswa memutuskan untuk menolak Ordonansi Sekolah Liar dalam konferensi di Mataram pada Oktober tahun 1932. Berbagai elemen Masyarakat mendukung perlawanan ini, dan pemerintah kolonial akhirnya mencabut ordonansi tersebut. Taman Siswa menghadapi tantangan baru setelah keberhasilan mencabut Ordonansi Sekolah Liar. Tantangan tersebut berupa pajak upah yang dikenakan selama lima tahun. Majelis Luhur melakukan berbagai negosiasi dan pertemuan dengan Departemen Keuangan. Berkat bantuan intervensi Gubernur Yogyakarta, masalah pajak upah akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 1940. Tantangan ini menunjukkan bahwa Taman Siswa tetap konsisten dalam memperjuangkan prinsip-prinsip pendidikannya meskipun terus menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1952: 246).

4.3. Penyelengaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Kurikulum merupakan dasar utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang harus dirancang secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan keragaman budaya. Salah satu unsur penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah **kearifan lokal**,

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mencerminkan identitas dan karakter bangsa. Kearifan lokal tidak hanya terbatas pada tradisi dan adat istiadat, tetapi juga mencakup pengetahuan lokal serta strategi kehidupan masyarakat dalam menghadapi tantangan, yang diwariskan secara turun-temurun (Yuliyanti, dkk, 2022: 4).

Ki Hadjar Dewantara menjadi tokoh sentral dalam pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang berorientasi pada kepentingan penjajah dan mengabaikan budaya lokal, ia mendirikan *Taman Siswa*. Lembaga pendidikan ini menawarkan kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter dan penanaman nilai kebangsaan melalui penguatan budaya nasional (Laili, dkk, 2023: 428).

Kurikulum Taman Siswa dibangun atas empat prinsip utama:

1. Menekankan budaya nasional dalam setiap mata pelajaran.
2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air.
3. Mengembangkan kesusilaan dan kebudayaan bangsa.
4. Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dengan pengajaran bahasa daerah dan asing sesuai kebutuhan (Wiratmoko, 2011: 10).

Selain itu, Taman Siswa juga mengusung **konsep** Trikon:

- *Kontinuitas*, yaitu keberlanjutan nilai-nilai budaya yang telah ada,
- *Konsentrisitas*, yakni menjadikan budaya bangsa sebagai pusat perhatian,
- *Konvergensi*, yaitu menyaring budaya luar secara selektif agar selaras dengan jati diri bangsa.

Meskipun secara struktur pembelajaran menyerupai sekolah kolonial, Taman Siswa menyusun kurikulum yang berbeda dalam isi dan tujuan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pertanian, pertukangan, seni tari, seni lukis, dan gamelan dijadikan sarana untuk membentuk karakter serta mengurangi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Dalam membentuk kepribadian peserta didik, pendidikan budi pekerti menjadi pilar utama. Ki Hadjar Dewantara membaginya ke dalam empat tahap perkembangan usia:

- **Taman Indria (5–8 tahun)**: pembiasaan spontan tanpa teori.
- **Taman Muda (9–12 tahun)**: pengenalan perilaku baik.
- **Taman Dewasa (14–16 tahun)**: pelatihan moral melalui kegiatan sosial.
- **Taman Madya & Guru (17–20 tahun)**: pembelajaran etika dan psikologi melalui ceramah dan diskusi (Tamansiswa, 1930: 487).

Pendidikan karakter ini menggunakan pendekatan psikologis dan bertahap, agar nilai-nilai moral dapat dihayati dan diamalkan secara alami sesuai usia peserta didik. Ki Hadjar Dewantara juga memperkenalkan **Sistem Among**, yaitu metode pendidikan berbasis kasih sayang, kebebasan, dan kodrat alam anak. Dalam

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

sistem ini, guru atau "pamong" bertindak sebagai pembimbing, bukan pengendali (Tuchid, 1872: 99). Sistem ini berpijak pada tiga semboyan terkenal:

- **Ing Ngarso Sung Tulodho** (di depan memberi teladan),
- **Ing Madyo Mangun Karso** (di tengah membangun semangat),
- **Tut Wuri Handayani** (di belakang memberikan dorongan) (Zulfianti, 2018: 318).

Sistem Among menyeimbangkan antara *cipta*, *rasa*, dan *karsa*, serta menanamkan nilai-nilai spiritual Timur yang mendalam dalam proses pendidikan. Seni juga memegang peranan penting dalam pendidikan Taman Siswa. Bagi Ki Hadjar Dewantara, seni adalah alat untuk membentuk kepribadian, bukan sekadar hiburan. Ia memasukkan berbagai bentuk seni ke dalam kurikulum seperti seni rupa, musik, tari tradisional (Srimpi dan Bedaya), gamelan, dan *sastra gending*—gabungan syair dan lagu. Melalui seni, ditanamkan nilai-nilai moral, estetika, serta rasa cinta terhadap budaya bangsa. Pembelajaran seni dipandang mampu memupuk nasionalisme dan menciptakan keseimbangan antara intelektual dan emosional peserta didik (Tamansiswa, 2011: 353). Untuk mendukung pembelajaran seni, Ki Hadjar juga menciptakan metode **Sariswara**, yaitu pendekatan pendidikan yang menggabungkan lagu, cerita, bahasa, dan gerak. Sariswara mengembangkan tiga aspek utama:

- **Wiraga** (gerak tubuh),
- **Wirasa** (olah rasa),
- **Wirama** (keselarasan antara gerak dan lagu).

Metode ini terbukti efektif dalam membentuk karakter, meningkatkan sensitivitas rasa, serta menanamkan nilai-nilai moral melalui pengalaman estetik yang menyenangkan. Tidak kalah penting**,** dolanan anak (permainan tradisional) juga dimanfaatkan sebagai sarana edukatif. Permainan seperti *Gobag Sodor*, *Engklek*, *Dakon*, dan lainnya digunakan untuk melatih keterampilan motorik, membangun kerja sama, serta menumbuhkan kedisiplinan. Dolanan anak juga menjadi media pewarisan budaya dan nilai moral dalam suasana yang menyenangkan. Melalui permainan, anak-anak belajar tentang aturan, empati, kejujuran, dan kebersamaan. Dengan seluruh pendekatan ini, Taman Siswa membuktikan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal bukan hanya mampu mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter, nasionalisme, dan kemanusiaan (Wicaksono, 2013: 39).

5. Simpulan

Berdasar pada uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pada masa penjajahan Belanda (1920–1942), Kota Yogyakarta mengalami ketimpangan sosial dan pendidikan akibat sistem kolonial yang diskriminatif. Akses pendidikan formal hanya terbuka bagi kaum elit, sementara rakyat jelata terpinggirkan. Kondisi ini mendorong Ki Hadjar Dewantara merancang

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal melalui pendirian **Taman Siswa**. Persiapan pendirian dilakukan secara matang melalui forum "Slasa Kliwonan" yang menghasilkan konsep sekolah mandiri dengan kurikulum budaya lokal dan sistem gotong royong. Pelaksanaan pendidikan di Taman Siswa berlandaskan falsafah *Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* dan menggunakan *sistem among* yang menekankan pendekatan humanis antara pamong dan siswa. Kurikulumnya memadukan nilai budaya, seni, dan permainan tradisional (dolonan) untuk mengembangkan potensi anak secara holistik.Taman Siswa menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetap bertahan meski menghadapi tekanan seperti Ordonansi Sekolah Liar dan pembatasan hak mengajar. Eksistensinya membuktikan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal mampu melawan diskriminasi dan menumbuhkan nasionalisme.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, Pendidikan di Indonesia 1900-1940, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dewantara, Ki Hadjar, 1952, Buku Catatan Tahun 1952,Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.

Dewantara, Ki Hadjar, 1977, Karya Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan Bagian Pertama, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewantara, Ki Hadjar, 1959, Demokrasi dan Leiderschap, Yogyakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.

Fudyartanta, K.R. dkk, 1986, Taman Siswa : Bunga Rampai Pemikiran, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Haryanto, 2013, Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP, UNY : Haryanto, 2013.

Iskandar, Ki Islam, 1989, Warisan Monumental dari Bapak Pendidik Nasional Artikel didalam Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan Cantrik dan Mentriknya, Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.

Indrakusuma, Amir Daien, 1973, Pengantar Ilmu Pendidikan, Malang: Ikip.

Makmur, Johan dkk, 1993, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Novianti, Upik Dyah Eka, 2020, Ki Hadjar Dewantara : Bapak Pendidikan Indonesia, I: BOEKOE.

Raharja, Karta, "Pendidikan Era Kolonial; Pembeda Pribumi Ningrat dan Melarat" https://republika.co.id/berita/po604b282/pendidikan-era-kolonial pembedapribumi-ningrat-dan-melarat (diakses, 27 Juli 2024).

Reksohadiprodjo, Moh. Said, 1972, Taman Siswa dan Alam Gagasannya, Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman.

Soeratman, Darsiti, 1986, Ki Hajar Dewantara, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Siswa.

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

Surjomihardjo, Abdurrachman. 1986, Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Sinar Harapan.

Tamansiswa, Majelis Luhur Persatuan, 2013, Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta : Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa.

Tsuchiya, Kenji, 1992, Taman Siswa Gerakan Kongres Nasional,Jakarta: Balai Pustaka.

Zainu'ddin, Alisa, 1970, "Education In The Netherlands East Indies and The Republic of Indonesia", Melbourne Studies in andfonline.com/doi/abs/10.1080/17508487009556022 Education Vol Tsuchiya, Kenji, (1992), Taman Siswa Gerakan Kongres Nasional,Jakarta: Balai Pustaka 12,

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online

Copyright ©2025, ISSN: 2598-3040 online